

PENGARUH DAU, DBH, DAN PAD TERHADAP BELANJA DAERAH DAN ANALISIS FLYPAPER EFFECT

Feizal Ilham Nashiri
feizal.ilhamn@gmail.com
Lailatul Amanah

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

The aim of this research was to find out the General Allocation Funds (GAF), Revenue Sharing Funds (GAF), Revenue Sharing Funds (RSF) and Local-Own Source Revenue (LOR) on Local Government Budget (LGB). This also tended to whether there was fly paper effect on General Allocation Funds and Local-Own source Revenue on Local Government Budget through budget realized which had been arranged by BPKP East Java province. Population of the research local government/city of East Java province which consists of 29 local governments and 9 cities in 2012-2016. While the sampling collection technique full sampling, in which there were 38 samples. Moreover, data analysis technique used multiple regression linier with SPSS. The research result showed GAF, RSF, and LOR were appropriate local government budget. The effective resources which were given to local government. The effective resources which were given local government budget about 96.0%. While, the hypothesis testing result showed each variables (RSF, LOR) positive significant effect on LGB. This condition concluded higher level of RSF, LOR would affect on the increase of LGB. Addition, research result there was fly paper effect. It meant the policy government budget was dominated by the amount of General Allocation Funds than Local-Own source Revenue.

Keywords: GAF, RSF, LOR, local government budget.

ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian ini mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah serta untuk mengetahui adanya *flypaper effect* pada pengaruh DAU dan PAD terhadap Belanja Daerah melalui laporan realisasi anggaran yang telah disusun oleh BPKP Provinsi Jawa Timur. Populasi yang digunakan dalam penelitian Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang terdiri atas 29 Kabupaten dan 9 Kota selama periode 2012-2016. Teknik pengambilan sampel menggunakan *full sampling*, sampel penelitian berjumlah 38 Kabupaten/Kota. Adapun teknik analisis menggunakan regresi linier berganda dengan alat bantu aplikasi SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*). Hasil pengujian kelayakan model menunjukkan bahwa DAU, DBH dan PAD layak untuk dijadikan prediktor belanja daerah. Sumbangan efektif yang diberikan oleh semua model terhadap belanja daerah sebesar 96,0%. Hasil pengujian hipotesis memperlihatkan masing-masing variabel DAU, DBH dan PAD berpengaruh signifikan dan positif terhadap belanja daerah. Kondisi ini mengindikasikan semakin tinggi tingkat DAU, DBH dan PAD akan berpengaruh terhadap peningkatan belanja daerah. Hasil pengujian juga ditemukannya *flypaper effect*, artinya kebijakan belanja daerah lebih didominasi oleh jumlah DAU daripada PAD.

Kata Kunci : DAU, DBH, PAD, belanja daerah

PENDAHULUAN

Tahun 1998 adalah tahun reformasi yang telah membawa banyak perubahan terhadap pola kehidupan sosial, politik dan ekonomi di Indonesia. Hal tersebut juga melahirkan adanya kebijakan baru dari pemerintah Republik Indonesia untuk bisa melaksanakan pembangunan daerah dengan harapan tata kelola pemerintahan yang baik yakni desentralisasi keuangan dalam pemberlakuan otonomi daerah.

Adanya kebijakan otonomi daerah ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang (UU No. 22 Tahun 1999) tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, lalu diperbarui menjadi UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah. Dua UU terakhir tersebut mengatur tentang pokok-pokok penyerahan kewenangan kepada pemerintah daerah serta pendanaan bagi implementasi kewenangan pengelolaan keuangan daerah.

Melalui UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah membawa pola baru dalam hal pengelolaan daerah, yaitu pemerintah daerah diberikan kedaulatan dalam mengatur serta mengelola sendiri urusan kegiatan pemerintahnya yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dapat dikatakan, otonomi daerah berperan dalam pengupayaan pemberdayaan daerah untuk optimalisasi dan pengembangan potensi daerah guna mengelola pemerintah daerah serta diharap dapat menekan sifat dependensi pemerintah daerah pada pemerintah pusat.

Desentralisasi fiskal yang mulai diberlakukan sebagai bentuk pelaksanaan otonomi daerah ternyata banyak membuat Pemerintah Daerah bergantung pada Pemerintahan Pusat, hal ini karena transfer dari pusat kepada daerah setempat dengan maksud menyamaratakan kemampuan keuangan malah lebih banyak atau tinggi dibandingkan pendapatan asli daerahnya sendiri inilah yang disebut *flypaper effect*.

Setiap pemerintah daerah dibebankan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan khalayak melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta khalayak sebagai dampak penerapan kebijakan otonomi secara umum. Demokratisasi, transparansi, akuntabilitas publik, dan partisipasi masyarakat, adalah dasar-dasar otonomi daerah yang perlu dipenuhi oleh pemerintah daerah. Yang berarti, pemerintah daerah diberi hak secara umum, jelas, responsibilitas, dan seimbang akan menata, memberi serta menggunakan sumber daya nasional dengan baik serta efisien dalam melakukan perimbangan keuangan pusat dan daerah (Purnamawati, 2006).

Pemerintah harus memiliki wewenang dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, serta didukung oleh perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah antara provinsi dan kabupaten/kota yang merupakan persyaratan dalam sistem pemerintah daerah. Desentralisasi ini diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata, yaitu: pertama mendorong peningkatan partisipasi, inisiatif serta kreativitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia di masing-masing daerah. Kedua, memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah yang memiliki informasi yang lengkap (Mardiasmo, 2002:25).

Kebijakan otonomi daerah menimbulkan masalah yaitu akan adanya kesenjangan fiskal antar daerah yang memaksa pemerintah pusat memberikan bantuan kepada daerah tersebut. Pemerintah daerah memiliki hak penuh terhadap pemanfaatan dana perimbangan. Namun, kewenangan tersebut memiliki imbas bahwa daerah mesti memanfaatkan dana perimbangan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan pelayanan publik (*public services*), harus bisa memporsikan sejumlah dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam Anggaran dan Belanja Daerah (APBD). Dana perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu mengurangi kesenjangan pendanaan pada pemerintah daerah dapat juga untuk mengatasi risiko terjadinya kesulitan keuangan (*financial distress*). Transfer antar pemerintah sudah menjadi ciri yang nyata dari hubungan keuangan antara pusat dan daerah serta merupakan fakta umum yang terjadi semua negara di dunia lepas dari sistem pemerintahannya. Mengurangi adanya kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin

tercapai standar pelayanan publik minimum di seluruh negeri adalah tujuan dari transfer ini (Maimunah, 2006:2).

Pemerintah pusat melaporkan dan menghitung APBD yang berisi transfer dari pemerintah pusat merupakan sumber dana utama pemerintah daerah membiayai operasi utama untuk sehari-hari menurut Halim, 2002 (dalam Rahmawati, 2015:2). Perbedaan respon pemerintah daerah untuk transfer dan pendapatan sendiri adalah beberapa penemuan oleh sebagian peneliti. Saat penerimaan daerah berasal dari transfer, stimulasi atas belanja yang ditimbulkan akan berbeda dengan stimulasi yang muncul dari pendapatan daerah, terutama dari pajak daerah.

Suatu fakta saat pemerintah daerah melakukan belanja lebih besar dengan memanfaatkan dana transfer yang direpresentasikan dengan DAU, dibanding dengan memanfaatkan potensi daerah sendiri yang direpresentasikan dengan PAD adalah peristiwa *flypaper effect*. Maksud bantuan transfer dari pusat sendiri adalah demi mengoptimalkan penerimaan daerah, sehingga di waktu akan datang bantuan transfer bisa berkurang. Namun seringkali pemerintah daerah lebih tergantung kepada dana transfer dibanding mengelola pendapatan daerahnya sendiri.

Menurut Nanga (dalam Adi dan Ekaristi, 2009:7) kebijakan pemberian dana alokasi umum malah menyebabkan perkembangan fiskal daerah melambat. Hal tersebut dikarenakan daerah akan memperoleh dana alokasi umum yang lebih sedikit jika mengalami kinerja fiskal yang lebih baik, diisyaratkan dengan berkembangnya pendapatan asli daerah. Akibatnya daerah akan lebih mengambil langkah untuk mendapatkan dana alokasi umum yang lebih besar dibandingkan berupaya untuk mengembangkan potensi pendapatan asli daerah sendiri yang akan berdampak pada tingkat dana alokasi umum yang berkurang.

Menurut Wibowo (dalam Adi dan Ekaristi, 2009:2) penerimaan daerah yang terbesar bersumber dari dana alokasi umum. Jumlah penerimaan yang berasal dari dana alokasi umum terus menerus meningkat dari tahun ke tahun, sedangkan penerimaan yang berasal dari pendapatan asli daerah cenderung menurun. Pemerintah daerah cenderung memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan dari pemerintah pusat dan menganggarkan peningkatan belanja yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan, jika keadaan ini terus berlangsung akan berakibat buruk terhadap cita-cita ekonomi yaitu adanya kemandirian daerah dalam mengelola dan memenuhi kebutuhan masyarakat kita sendiri.

Selain DAU transfer dalam bentuk transfer tak bersyarat adalah DBH atau Dana Bagi Hasil, berdasarkan sebelumnya yaitu menurut (Sasana, 2010) menyatakan bahwa DBH berpengaruh signifikan dalam belanja daerah dan menandakan DBH adalah salah satu factor pendukung terjadinya *flypaper effect*. Lalu penelitian dari Kusumadewi dan Rahman (2007) menyatakan *flypaper effect* bisa saja terjadi pada tingkat PAD yang rendah.

UU No. 23 Tahun 2014 memberikan hak kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Hal ini mendorong pemerintah daerah untuk terpacu dalam meningkatkan pendapatan asli daerah yang terdiri dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain dari PAD yang sah. PAD yang meningkat diharapkan dapat mampu mengembangkan pelayanan publik yang semakin memuaskan, maka dibentuk suatu anggaran daerah yang dikenal dengan Anggaran dan Belanja Daerah (APBD).

Kesejahteraan masyarakat daerah melalui meningkatnya pelayanan, pemberdayaan, serta peran masyarakat dalam membangun daerahnya masing-masing adalah harapan berlakunya otonomi kepada pemerintah daerah. Pemerintah pusat memberi kewenangan pemerintah daerah untuk memungut pajak atau retribusi, dan mengelola Sumber Daya Alam (SDA) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi.

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh (Maimunah, 2006) dan (Sasana, 2010) menyimpulkan bahwa telah terjadi *flypaper effect* di berbagai daerah yang mereka sebutkan, hal ini menimbulkan pertanyaan apakah penyebab *flypaper effect* sehingga Pemerintah Pusat belum melakukan perbaikan yang berarti dalam hal pembiayaannya. Dengan pertimbangan tersebut dan semakin banyaknya kasus *flypaper effect* yang menyebabkan stigma negatif Pemerintah Daerah, maka penting untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *flypaper effect*, khususnya pada alokasi dana transfer (DAU, DBH) dan Pendapatan Asli Daerah. Untuk itu harus ada kajian teoretis secara komprehensif sehingga Pemerintah Daerah dapat memperbaikinya

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah : (1) Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Daerah?; (2) Apakah Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap Belanja Daerah?; (3) Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Daerah?; (4) Apakah terjadi *flypaper effect* pada pengaruh DAU dan PAD terhadap Belanja Daerah?

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah; (2) Untuk mengetahui pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah; (3) Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah; (4) Untuk mengetahui apakah terjadi *flypaper effect* pada pengaruh DAU dan PAD terhadap Belanja Daerah.

TINJAUAN TEORITIS

Teori Keagenan

Teori keagenan merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara pihak kontrak perjanjian. Pihak *principal* merupakan pihak yang bertugas membuat suatu kontrak, mengawasi, dan memberikan perintah atas kontrak tersebut. Sedangkan pihak *agent* bertugas menerima dan menjalankan kontrak yang sesuai dengan keinginan pihak *principal*. (Purwanti, 2013)

Didalam suatu hubungan keagenan yaitu eksekutif dan legislatif. Eksekutif menyusun sebuah anggaran daerah berbentuk RAPBD kemudian disalurkan kepada DPRD untuk diidentifikasi. Apabila RAPBD sudah sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), maka pihak legislatif (DPRD) melakukan tindak pengesahan RAPBD berubah menjadi APBD. APBD oleh pihak legislatif (DPRD) digunakan sebagai alat untuk mengawasi kinerja pihak eksekutif.

Diantara hubungan legislatif dengan publik, legislatif (DPRD) bertugas menjadi *agent* dan publik bertugas menjadi *principal*. Menurut Hagen (2005) bahwa terjadinya hubungan antara publik dan legislatif yang pada awalnya menunjukkan bagaimana publik memilih politisi dalam membuat suatu keputusan mengenai belanja publik dan memberikan dana dengan membayar pajak.

Lalu pihak legislatif terlibat dalam pembuatan keputusan mengenai pengalokasian belanja dalam anggaran, maka DPRD diharapkan mewakili kepentingan publik. Jadi walaupun legislatif menjadi pihak prinsipal, disisi lain dapat bertindak sebagai *agent* dalam hubungannya dengan publik. Sehingga legislatif menempatkan dirinya sebagai pihak yang menerima tugas dari publik, dan melakukan pendelegasian kepada eksekutif untuk menjalankan penganggaran.

Perancangan APBD yang dibuat antara eksekutif dan legislatif berpedoman pada Kebijakan Umum APBD dan Plafon Anggaran. Pihak eksekutif membuat rancangan APBD yang kemudian diserahkan kepada legislatif untuk dipelajari dan dibahas bersama-sama sebelum ditetapkan sebagai Perda. Dalam perspektif keagenan, APBD merupakan bentuk kontrak yang dijadikan alat oleh legislatif untuk mengawasi pelaksanaan anggaran oleh eksekutif (Darwanto dan Yustikasari, 2007).

Konsep *agency* adalah hubungan atau kontrak antara *principal* dan *agent* (Anthony dan Govindarajan, 2010). Pendelegasian tanggung jawab termasuk pendelegasian otoritas pengambilan keputusan kepada *agent* (dalam hal ini publik) untuk melakukan tugas tertentu sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati bersama adalah pihak *principal* (dalam hal ini legislatif). Peraturan perundang-undangan secara implisit merupakan bentuk kontrak antara eksekutif, legislatif dan publik di suatu pemerintahan. Suatu konflik kepentingan antara *principal* dan *agent* terjadi jika anggapan teori *agency* diantara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi dimana kontrak kerja antara *principal* dan *agent* tersebut dibuat dengan asumsi *agent* akan melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan *principal*.

Otonomi Daerah

Otonomi (*autonomy*) secara etimologi berasal dari bahasa Yunani. *Auto* berarti sendiri dan *nomous* berarti hukum atau peraturan. Kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah maksud otonomi daerah (Bastian 2006:338). Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah). Halim (2008) menyatakan otonomi daerah pada dasarnya berkenaan dengan pelimpahan wewenang pada pengambilan keputusan, kebijakan, pengelolaan dana publik serta pengaturan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat.

Beberapa asas penting dalam Undang-Undang Otonomi Daerah yang perlu dipahami, yaitu (Bastian, 2006:338): (1) Penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonomi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Asas desentralisasi); (2) Pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan dari perangkat pusat di daerah (Asas dekonsentrasi); (3) Penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa serta dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana, dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskan (Tugas pembantuan); (4) Suatu sistem pembiayaan pemerintah dalam rangka Negara Kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, serta kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya (Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah).

Flypaper effect

Flypaper effect adalah suatu fakta saat pemerintah daerah melakukan belanja lebih besar dengan memanfaatkan dana transfer atau spesifiknya transfer tidak bersyarat, dibanding dengan memanfaatkan pendapatan daerah sendiri sehingga akan berakibat pemborosan dalam belanja daerah.

Maimunah (2006) menyatakan bahwa *flypaper effect* terjadi karena 2 syarat yaitu ketika dalam hasil pengujian yang diperoleh menunjukkan: (1) besarnya nilai koefisien DAU yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai koefisien PAD dan koefisien keduanya signifikan; (2) nilai koefisien PAD tidak signifikan. Dengan asumsi menentukan terjadinya *flypaper effect* dengan membandingkan antara pengaruh PAD serta DAU terhadap belanja daerah.

Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah

Secara konseptual, desentralisasi fiskal mensyaratkan bahwa tiap hak yang diberikan kepada daerah harus disertakan dengan pembiayaan yang besarnya sesuai dengan besar beban hak tersebut. Konsep ini dikenal dengan *money follow function*, bukan lagi *function follow money*. Yang berarti, pemerintah pusat berkewajiban menjamin sumber keuangan terkait dengan pendelegasian wewenang dari pusat ke daerah. Artinya, bahwa hubungan keuangan pusat daerah perlu diberikan pengaturan sedemikian rupa sehingga kebutuhan pengeluaran yang akan menjadi tanggung jawab saat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan yang ada. Berdasarkan UU No. 33/2004 sumber-sumber pendanaan keuangan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.

Menurut Yuswanto (2010) hubungan keuangan antara pusat dan daerah adalah menyangkut pembagian tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan tertentu antara tingkat-tingkat pemerintah dan pembagian sumber penerimaan untuk menutup pengeluaran akibat kegiatan-kegiatan tertentu. Tujuan utamanya untuk mencapai perimbangan antara berbagai pembagian, disamping itu antara potensi dan sumber daya masing-masing daerah dapat sesuai.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang No. 33 tahun 2004 adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan daerah kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

UU No. 33 Tahun 2004 menyebutkan PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi.

Dana Alokasi Umum

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Dana Alokasi Umum adalah dana yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang bersumber dari pendapatan APBN.

Dana Alokasi Umum pada suatu daerah ditentukan sesuai besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah dan potensi daerah.

$$\begin{aligned} \text{DAU Provinsi} &= \text{jumlah DAU provinsi} \times \frac{\text{bobot daerah provinsi yang bersangkutan}}{\text{bobot seluruh daerah provinsi}} \\ \text{DAU Kab/Kota} &= \text{jumlah DAU kab/kota} \times \frac{\text{bobot daerah kab/kota yang bersangkutan}}{\text{bobot seluruh daerah kab/kota}} \end{aligned}$$

Dana Bagi Hasil

Dana yang diperuntukkan pada daerah berdasarkan angka persentase yang ditentukan dengan tujuan untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka keberhasilan pelaksanaan program desentralisasi, yang berasal dari pendapatan APBN, disebut dana bagi

hasil. Dana Bagi Hasil terdiri atas DBH Pajak dan DBH sumber daya alam bersumber dari UU No. 33 Tahun 2004.

Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan menurut UU No. 33 Tahun 2004. Belanja daerah dilaksanakan untuk mendanai urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, sedangkan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hal tersebut sesuai UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Urusan pemerintah yang dimaksud terdiri dari atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah

Pendapatan asli daerah didefinisikan sebagai penerimaan yang didapat oleh daerah berasal dari potensi pada daerahnya masing-masing serta dipungut sesuai dengan yang tertuang dalam peraturan daerah pada peraturan perundang-undangan yaitu menurut UU No. 33 Tahun 2004. Belanja daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004, yaitu belanja yang dilakukan dalam rangka untuk membiayai tugas pemerintah yang telah menjadi kekuasaan daerah, dan sebaliknya tugas pemerintah merupakan kekuasaan dari pemerintah pusat didanai oleh APBN.

Menurut Sidik (2012), ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD khususnya pajak dan retribusi daerah sebaiknya harus menjadi bagian dari sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat sebagai suatu syarat mendasar dalam melaksanakan sistem pemerintahan negara.

H₁: PAD berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

Pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah

DAU adalah salah satu dari beberapa sumber utama dalam pembiayaan belanja daerah selain PAD serta dana perimbangan lainnya. Semakin besar kisaran DAU yang didapat pemerintah daerah, maka daerah tersebut masih memiliki ketergantungan yang besar pada bantuan dana dari Pemerintah Pusat, dan dapat digambarkan bahwa daerah tersebut masih belum cukup mandiri dan belum mampu menjadi daerah otonom sebagaimana dijelaskan UU No. 32 Tahun 2004, hal itu menjadi bagian dari faktor terjadinya *flypaper effect*.

Penelitian Pramuka (2010) membuktikan bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Penelitian lain dikerjakan oleh Aprilla dan Saputra (2013) juga membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang positif dari DAU terhadap Belanja Daerah, selanjutnya penelitian dari Saputri dan Muid (2014) menyatakan bahwa DAU berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah dengan sampel dari Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota pada Provinsi di Jawa Tengah, kemudian Adiputra (2014) melakukan studi pada Kabupaten Karang Asem menyatakan hasil yang sama bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah, disusul penelitian dari Oktavia (2014) yang menunjukkan hasil bahwa DAU berpengaruh terhadap Belanja Daerah, Kurnia (2013) yang meneliti mengenai pemetaan indeks kemampuan keuangan dan pertumbuhan ekonomi juga

menyatakan bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah, hasil yang sama juga ditunjukkan pada penelitian Amelia (2016) bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.

H₂: Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

Pengaruh DBH terhadap Belanja Daerah

Dana bagi hasil merupakan dana yang berasal dari pendapatan APBN yang didistribusikan kepada daerah sesuai dengan angka persentase tertentu yang telah ditetapkan dalam rangka mendanai kebutuhan daerah dengan tujuan pelaksanaan desentralisasi. Menurut UU No. 33 tahun 2004 dana bagi hasil terdiri dari DBH pajak dan DBH sumber daya alam. Belanja daerah sendiri dilaksanakan untuk membiayai urusan pemerintah yang telah dilimpahkan kepada daerah serta menjadi kewenangan daerah, sedangkan urusan pemerintah telah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dibiayai oleh APBN.

Penelitian yang dilakukan oleh Sasana (2010) menyatakan bahwa koefisien DBH memiliki pengaruh positif terhadap belanja daerah yang menyatakan bahwa setiap peningkatan DBH sebesar 1 juta berpengaruh terhadap bertambahnya belanja daerah sebesar 1,19 juta rupiah, selain itu menurut penelitian Iskandar (2012) menyatakan bahwa *unconditional grants* atau transfer tak bersyarat (DAU, DBH) memiliki pengaruh signifikan positif terhadap belanja daerah.

Teori keagenan mendasari hipotesis ini karena DBH merupakan bagian dari dana transfer yang berujuan untuk meratakan kemampuan keuangan hanya saja besar kecilnya tergantung kondisi pajak dan sumber daya alam masing-masing daerah, namun memang tidak sebesar DAU akan tetapi DBH juga memiliki peran dalam pembiayaan belanja daerah.

H₃: DBH berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

Pengaruh *Flypaper Effect* pada DAU dan PAD terhadap Belanja Daerah

Studi Anderson (dalam Abdullah dan Halim, 2003) tentang perubahan pada sistem dana transfer (*grants*) terhadap pengeluaran pemerintah daerah di negara Swedia, ditemukan adanya kenaikan dalam transfer bukan pengimbang (*non-matching grants*) yang akan menyebabkan lonjakan pengeluaran di pemerintah daerah, lain halnya jika kenaikan dalam pendapatan yang bersumber dari pajak. Tarif pajak yang mengalami kenaikan lambat laun akan menyebabkan penurunan dalam pengeluaran daerah.

Penelitian Legrenzi dan Milas (2001) juga memberikan bukti empiris tentang adanya *flypaper effect* dalam jangka panjang untuk sampel municipalities di Italia. Penelitian Zampelli (1986) memberi bukti yang sama untuk data pemerintah kota di Amerika Serikat, akan terjadinya *flypaper effect* dalam reaksi belanja terhadap transfer tanpa syarat (*unconditional grants*). Karena itu *flypaper effect* dipandang sebagai suatu keganjilan dalam perilaku rasional jika transfer harus dianggap sebagai (tambahan) pendapatan masyarakat (seperti halnya pajak daerah), sehingga semestinya dihabiskan (dibelanjakan) dengan cara yang sama pula (Hines dan Thaler, 1995).

H₄: Koefisien pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah lebih besar dibandingkan koefisien pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode kausalitas (*causal research*), yaitu jenis penelitian yang karakteristik masalahnya berupa korelasi sebab-akibat antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2014), yang memiliki sifat pengujian hipotesis mengenai adanya *flypaper effect* yang terjadi dalam transfer dana DAU,

DBH, dan PAD terhadap Belanja Daerah yang dilakukan secara empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Prov. Jawa Timur.

Populasi penelitian ini adalah seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur berjumlah 38 daerah rentang waktu dari tahun 2012-2016. Data mengenai jumlah PAD, DAU, DBH serta belanja daerah yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang terdiri atas 29 Kabupaten dan 9 Kota. Sampel penelitian ini adalah Kabupaten/Kota yang menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jawa Timur tahun periode 2012-2016 yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebanyak 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah full sampling, yaitu semua daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang melaporkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jawa Timur yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Teknik Pengumpulan Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data dokumenter, yaitu jenis data penelitian berupa arsip yang memuat apa dan kapan suatu kejadian atau transaksi serta siapa yang terlibat dalam suatu kejadian.

Berdasarkan sumbernya, data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh selain dari responden yang menjadi sasaran penelitian. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang terpublikasi dan yang tidak terpublikasi.

Untuk memperoleh data yang relevan supaya sejalan akan permasalahan yang dimaksud maka data yang dimanfaatkan penulis dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini berupa Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur selama periode Anggaran 2012-2016 yang diperoleh dari BPK Provinsi Jawa Timur.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian adalah: (1) Variabel independen yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH); (2) Variabel dependen adalah Belanja Daerah (BD).

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD dalam penelitian ini merupakan angka realisasi PAD pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada Tahun Anggaran 2012-2016 dengan nominal mata uang Rupiah (Rp). Cara untuk menghitung PAD sesuai pada UU No. 33 Tahun 2004:

$$\text{PAD} = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan} + \text{lain-lain PAD yang sah.}$$

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. DAU dalam

penelitian ini merupakan angka realisasi DAU Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. Penghitungan DAU yaitu:

$$\text{DAU} = (\% \times \text{bobot}) \times (\text{DAU Kabupaten/Kota})$$

Dana Bagi Hasil

Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi merupakan dana bagi hasil. Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, DBH dalam penelitian ini merupakan realisasi angka DBH pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2012-2016, menggunakan mata uang Rupiah (Rp). Variabel Dana Bagi Hasil diukur dengan menggunakan rumus:

$$\text{DBH} = \text{DBH Pajak} + \text{DBH Bukan Pajak}$$

Belanja Daerah

Belanja Daerah menurut UU No. 12 tahun 2008 adalah semua kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah dalam penelitian ini dapat diketahui dari pos belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah tahun 2012 hingga 2016 dengan nominal mata uang Rupiah (Rp). Penghitungan Belanja Daerah menurut Aprilla dan Redo (2013) sebagai berikut:

$$\text{Belanja Daerah} = \text{Belanja Operasional} + \text{Belanja Modal}.$$

Flypaper effect

Flypaper effect adalah suatu kondisi yang terjadi pada saat pemerintah daerah merespon belanja daerah lebih banyak dengan menggunakan dana transfer (DAU) daripada menggunakan pendapatan asli daerahnya.

Menurut Nabilah *et al.* (2016) untuk terjadi atau tidaknya *flypaper effect* maka peneliti menggunakan pendekatan *flypaper effect* yakni menggunakan perbandingan antara koefisien PAD dan koefisien DAU. Jika koefisien DAU > koefisien PAD maka terjadi *flypaper effect*, atau bisa juga dapat difungsikan jika $b_1 > b_2$, berarti $b_1/b_2 > 1$ maka terjadi *flypaper effect*.

Contoh :

$$\frac{\text{koefisien DAU}}{\text{koefisien PAD}} = \frac{1,45712}{5,73894} = 0,2696.$$

Teknik Analisis Data

Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan suatu metode dalam mengorganisasi dan menganalisis data kuantitatif, sehingga diperoleh gambaran yang teratur mengenai suatu kegiatan. Ukuran yang digunakan dalam deskripsi antara lain: frekuensi, tendensi sentral (*mean, median, modus*), dispersi (standar deviasi dan varian), dan koefisien korelasi antar variabel penelitian. Ukuran yang digunakan dalam statistik deskriptif tergantung pada tipe skala pengukuran *construct* yang digunakan dalam penelitian (Ghozali, 2007).

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel-variabel dalam penelitian mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Menurut Ghozali (2007) pada prinsipnya normalitas dapat ditemukan dengan melihat penyebaran data atau titik pada sumbu diagonal dari grafik. Dasar pengambilan keputusan yaitu: (1) Apabila data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal menunjuk pada pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas; (2) Apabila data menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal tidak

menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tersebut tidak memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2007:91). Pada model regresi yang baik tidak ditemukan adanya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel independen. Jika terjadi korelasi, maka terdapat masalah yang dinamakan multikolinearitas (multikol). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya suatu multikolinearitas di dalam model regresi dapat dilihat dari: (1) Besarnya VIF (*Varian Inflation Factor*) dan *Tolerance*. Nilai VIF (*Varian Inflation Factor*) < 10 dan Nilai TOL (*Tolerance*) > 0,10; (2) Korelasi antar Variabel Independen. Tanda suatu model regresi yang bebas multikolinearitas adalah jika koefisien antar variabel independen lemah, jika variabel bebas mempunyai korelasi yang cukup tinggi (umumnya diatas 0,90) maka terjadi indikasi adanya multikolinearitas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji adanya korelasi yang tinggi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode sebelumnya (Ghozali, 2007:95). Model regresi yang baik harus terhindar dari autokorelasi. Jika terjadi korelasi, maka diidentifikasi terjadi masalah autokorelasi. Cara mendeteksi autokorelasi salah satunya adalah dengan menggunakan tabel *Durbin-Watson*, dengan jumlah variabel bebas (k) dan jumlah data (n) sehingga diketahui dL dan du, maka dapat diperoleh distribusi daerah keputusan atau tidak terjadi korelasi. Kriteria pengujiannya adalah:

Tabel 1
Kriteria Pengujian Durbin Watson

Hipotesis Nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < d_l$
Tidak ada autokorelasi positif	No decision	$d_l \leq d \leq d_u$
Tidak ada korelasi negative	Tolak	$4 - d_l < d < 4$
Tidak ada korelasi negative	No decision	$4 - d_u \leq d \leq 4 - d_l$
Tidak ada autokorelasi positif atau negatif	Tidak ditolak	$d_u < d < 4 - d_u$

Sumber: Ghozali (2007:100)

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali, 2007:69). Jika varians residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Sebaliknya, jika varians residual berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Jika varians dari residual antar pengamatan bersifat tetap, kesimpulannya terjadi homoskedastisitas sehingga model regresi dinyatakan baik.

Menurut Ghozali (2007:69) temuan ada atau tidaknya Heteroskedastisitas bisa dilakukan dengan merujuk ada atau tidaknya pola tertentu di grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED, dimana sumbu Y adalah Y yang diprediksi, dan sumbu X adalah nilai residual (Y prediksi - Y sesungguhnya) yang telah di *studentized*. Pokok analisisnya adalah: (1) Jika terlihat pola tertentu, seperti titik-titik dengan membentuk pola yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka dapat mengindikasikan terjadi Heteroskedastisitas; (2) Jika tidak terlihat pola yang jelas serta seperti titik-titik yang menyebar diatas maupun dibawah angka 0 di sumbu Y maka diindikasikan tidak terjadi Heteroskedastisitas.

Pengujian Hipotesis

Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi adalah metode statistika yang menjelaskan pola hubungan dua variabel atau lebih melalui sebuah persamaan. Tujuan permodelan regresi adalah untuk menjelaskan hubungan antara dua atau lebih variabel serta untuk memprediksi kondisi di masa yang akan datang. Model regresi terdiri atas dua macam yaitu regresi linier sederhana dan regresi berganda.

Analisis dengan menggunakan regresi linier berganda digunakan menguji suatu variabel terikat terhadap beberapa variabel bebas. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda yang digunakan untuk melihat pengaruh PAD, DAU dan DBH terhadap pengeluaran pemerintah yang berupa belanja daerah.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kuantitatif, dengan jenis *time series* dalam tahunan. Data *time series* yang digunakan pada periode 2012-2016. Menggunakan alat analisis regresi linier berganda menggunakan metode kuadrat terkecil *Ordinary Least Squares* (OLS) yang digunakan untuk menganalisis pengaruh dari DAU, DBH, dan PAD serta hubungannya terhadap Belanja Daerah. Data diolah dengan menggunakan alat bantu berupa SPSS 20.

Persamaan Hipotesis :

$$BD = \alpha + \beta_1 DAU_t + \beta_2 DBH_t + \beta_3 PAD_t + e$$

Keterangan:

BD	: Belanja Daerah
α	: konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$: koefisien/intersep korelasi variabel DAU, DBH, PAD
DAU	: Dana Alokasi Umum
DBH	: Dana Bagi Hasil
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
t	: periode
e	: <i>error</i>

Uji Koefisien Korelasi

Uji koefisien korelasi determinasi adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui seberapa baik model regresi dalam memprediksi variabel independen. Besarnya koefisien determinasi ditunjukkan dengan nilai *Adjusted R²*. Nilai dalam koefisien determinasi berkisar antara nol dan satu, apabila nilai koefisien kecil bahkan hampir mendekati angka nol maka dapat dipastikan kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependennya sangat terbatas. Sebaliknya jika nilai hampir mendekati angka satu menandakan bahwa variabel independen mampu menjelaskan hampir seluruh informasi yang dibutuhkan.

Uji *Goodness of Fit* / Uji Kelayakan Model (Uji F)

Ketepatan fungsi regresi untuk menafsir nilai aktual bisa diukur dari *goodness of fit*-nya. Secara statistik, setidaknya ini dapat diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F, dan nilai statistik t. Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik jika nilai uji statistiknya berada dalam daerah krisis (daerah dimana H_0 ditolak).

Sebaiknya disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana H_0 diterima (Ghozali, 2011:83): (1) Koefisiennya determinasi (R^2) pada dasarnya adalah menghitung berapa jauh kesanggupan model untuk menjelaskan berbagai variabel dependen. Nilai koefisien determinasi yaitu antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kesanggupan variabel-variabel independen untuk menerangkan variasi variabel dependen terbatas. Angka yang mendekati satu artinya variabel-variabel independen memberi hampir

seluruh informasi yang diperlukan guna memprediksi variasi-variasi dependen. (Ghozali, 2011:83); (2) Uji F digunakan untuk melihat signifikansi model yang digunakan dalam penelitian (Ferdinand, 2006:64).

Kriteria pengujian; (a) Jika Sig < (α) 0,05, maka model regresi yang dihasilkan baik (layak) dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya; (b) Jika Sig > (α) 0,05, maka model regresi yang dihasilkan tidak baik (tidak layak) untuk digunakan pada analisis selanjutnya.

Uji t

Uji t-statistik adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah hipotesis diterima dan untuk mengidentifikasi bagaimana variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Berikut adalah kriteria berpengaruhnya keseluruhan variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial dengan *level of significant* $\alpha = 5\%$: (1) Jika nilai signifikansi $t < 0,05$, maka H_0 ditolak, artinya ada pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen; (2) Jika nilai signifikansi $t > 0,05$, maka H_0 diterima, artinya tidak ada pengaruh signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dalam penelitian ini menggambarkan nilai minimum, maksimum, mean serta standar deviasi dari variabel DAU, DBH dan PAD serta Belanja Daerah. Penelitian yang telah dilakukan statistik deskriptif diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 2
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DAU	190	132951,00	1709893,00	853623,4789	289547,02801
DBH	190	17903,00	2370085,00	126159,4474	242764,88727
PAD	190	31494,00	4090207,00	299110,5158	545067,92779
BD	190	462241,00	7151662,00	1657157,9632	934812,48974
Valid N (listwise)	190				

Sumber: Data Sekunder diolah, 2018

Berdasarkan tabel 2 dapat dijelaskan masing-masing nilai minimum, maksimum, mean serta standar deviasi dari DAU, DBH dan PAD serta Belanja Daerah sebagai berikut :

Nilai rata-rata dari DAU dari 190 jumlah data yang digunakan sampel sebesar 853.623,4789 lebih besar dari nilai standar deviasi sebesar 289.547,02801. Kondisi ini mengindikasikan hasil yang baik, tidak terjadi penyimpangan data. Nilai minimum DAU sebesar 132.951,00 sedangkan nilai maksimum sebesar 1.709.893,00. Kondisi ini memperlihatkan umumnya tingkat Dana Alokasi Umum pada pemerintah kabupaten/kota propinsi Jawa Timur tinggi. Kondisi ini memperlihatkan tingkat ketergantungan pemerintah Kabupaten/Kota propinsi Jawa Timur tinggi guna memenuhi kebutuhan belanja daerahnya tinggi.

Nilai rata-rata dari DBH dari 190 jumlah data yang digunakan sampel sebesar 126.159,4474 lebih kecil dari nilai standar deviasi sebesar 242.764,88727. Kondisi ini mengindikasikan hasil yang kurang baik, karena terjadi penyimpangan data. Nilai minimum DBH sebesar 17.903,00 sedangkan nilai maksimum sebesar 2.370.085,00. Kondisi ini memperlihatkan umumnya tingkat Dana Bagi Hasil pemerintah kabupaten/kota propinsi Jawa Timur relatif rendah.

Nilai rata-rata dari PAD dari 190 jumlah data yang digunakan sampel sebesar 299.110,5158 lebih kecil dari nilai standar deviasi sebesar 545.067,92779. Kondisi ini

mengindikasikan hasil yang kurang baik, karena terjadi penyimpangan data. Nilai minimum PAD sebesar 31.494,00 sedangkan nilai maksimum sebesar 4.090.207,00. Kondisi ini memperlihatkan umumnya tingkat Pendapatan Asli Daerah pemerintah kabupaten/kota propinsi Jawa Timur relatif tinggi.

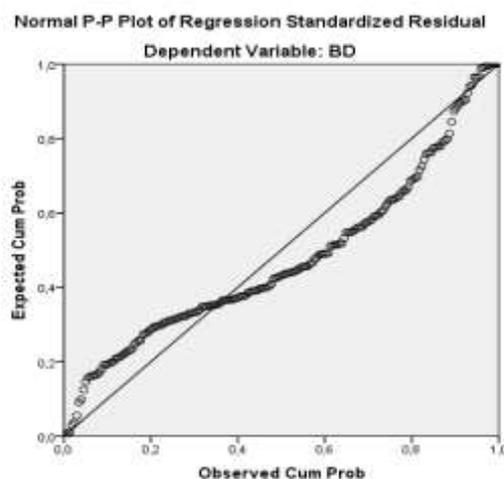
Nilai rata-rata dari Belanja Daerah dari 190 jumlah data yang digunakan sampel sebesar 1.657.157,9632 lebih besar dari nilai standar deviasi sebesar 934.812,48974. Kondisi ini mengindikasikan hasil yang baik, karena tidak terjadi penyimpangan data. Nilai minimum Belanja Daerah sebesar 462.241,00 sedangkan nilai maksimum sebesar 7.151.662,00. Kondisi ini memperlihatkan umumnya tingkat Belanja Daerah pemerintah kabupaten/kota propinsi Jawa Timur relatif tinggi.

Uji Asumsi Klasik

Agar data dalam penelitian tidak mengalami gangguan, serta pengambilan keputusan tidak bias, maka dalam penelitian digunakan uji asumsi klasik melalui uji normalitas, multikolinieritas, autokorelasi serta heteroskedastisitas. Hasil pengujian asumsi klasik yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut :

Pengujian Normalitas Data

Pengujian normalitas dalam penelitian dilakukan melalui uji grafik normal *P-P Plot of regression standard* sebagai berikut:



Sumber: Data Sekunder diolah, 2018

Gambar 1

Grafik Pengujian Normalitas Data

Gambar 1 terlihat grafik distribusi data telah mengikuti garis diagonal antara 0 (nol) dengan pertemuan sumbu Y (*Expected Cum. Prob.*) dengan sumbu X (*Observed Cum Prob.*) kondisi ini memperlihatkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Hasil ini juga dipertegas dengan hasil uji *kolmogorov-smirnov* yang telah dilakukan. Tabel 3 memperlihatkan besar nilai *Asymp sig (2-tailed)* yaitu $0,130 > 0,050$, yang cocok dengan ketentuan yang telah diberlakukan, lalu bisa kita simpulkan bahwa data itu telah terbukti terdistribusi normal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa baik melalui pendekatan *kolmogorov-smirnov* maupun pendekatan grafik model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.

Tabel 3
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		190
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	186697,43712758
Most Extreme Differences	Absolute	,131
	Positive	,131
	Negative	-,103
Kolmogorov-Smirnov Z		1,802
Asymp. Sig. (2-tailed)		,130

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data Sekunder diolah, 2018

Pengujian Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas dilakukan guna menguji model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Pada model regresi yang baik tidak ditemukan adanya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel independen. Jika terjadi korelasi, maka terdapat problem yang dinamakan multikolinearitas (multikol). Pengujian multikolinearitas yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4
Pengujian Multikolinearitas

Variabel	Nilai Tolerance	VIF	Keterangan
DAU	0,792	1,262	Tidak terjadi Multikolinearitas
DBH	0,864	1,158	Tidak terjadi Multikolinearitas
PAD	0,878	1,139	Tidak terjadi Multikolinearitas

Sumber: Data Sekunder diolah, 2018

Tabel 4 memperlihatkan besarnya nilai *Variance Influence Factor* (VIF) pada seluruh variabel DAU, DBH dan PAD yang dijadikan model penelitian lebih kecil dari 10. Kondisi ini menunjukkan dalam persamaan regresi tidak ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Dengan demikian tidak terjadi gangguan multikolinieritas dari model yang digunakan dalam penelitian.

Pengujian Autokorelasi

Pengujian autokorelasi dalam penelitian ini dengan melihat nilai *Durbin Watson*. Nilai *Durbin Watson* yang diperoleh sebesar 1,755. Dengan N yang diuji sebanyak 190 serta jumlah variable bebas sebanyak 3. Dengan tingkat signifikansi yang digunakan (α) adalah 5% diperoleh 'dL sebesar 1,738 dan 'dU = 1,799 serta 4-'dU = 2,201 dan 4-'dL = 2,262. Kriteria pengujian yaitu seperti nampak di dalam tabel 5 berikut:

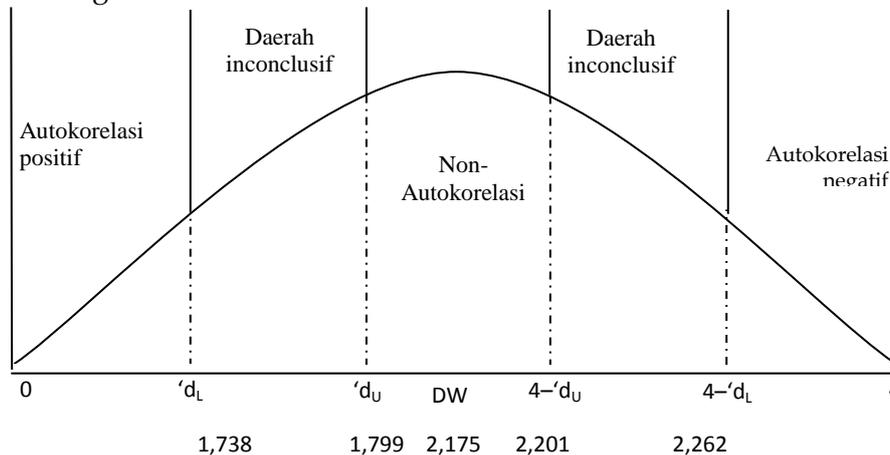
Tabel 5
Batas-batas Daerah Test Durbin Watson

Distribusi	Interpretasi
DW < 1,738	Autokorelasi positif
1,738 ≤ DW < 1,799	Daerah keragu-raguan/inconclusif
1,799 ≤ DW < 2,201	Tidak ada autokorelasi
2,201 ≤ DW < 2,262	Daerah keragu-raguan/inconclusif
DW ≥ 2,262	Autokorelasi negative

Sumber: Data Sekunder diolah, 2018

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan nilai DW 1.449 berada diantara -2 sampai 2 bisa digambarkan bahwa $(-2 < 1.449 < 2)$, sehingga dapat disimpulkan model yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi gangguan korelasi, maka bisa dikatakan regresi yang baik karena tidak terjadi autokorelasi.

Dari tabel 5 untuk lebih jelasnya terjadi gangguan autokorelasi atau dapat digambarkan sebagai berikut :



Sumber: Data Sekunder diolah, 2018

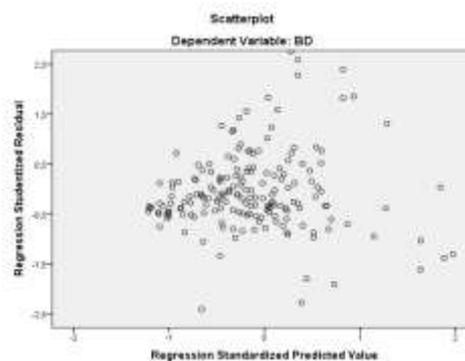
Gambar 2

Kurva Distribusi Nilai Durbin Watson

Dari tabel batas-batas distribusi nilai *test Durbin-Watson* dan kurva Pengujian autokorelasi *Durbin-Watson* di atas bisa disimpulkan bahwa nilai *test Durbin-Watson* berada pada daerah non autokorelasi sehingga dapat disimpulkan model yang digunakan penelitian tidak terjadi gangguan autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas Data

Hasil pengujian heteroskedastisitas yang telah dilakukan disajikan dalam grafik sebagai berikut:



Sumber: Data Sekunder diolah, 2018

Gambar 3

Heteroskedastisitas

Dari gambar di atas terlihat titik-titik tersebar secara acak, tidak membentuk pola tertentu yang jelas, dan tersebar di atas atau di bawah angka 0 pada sumbu Y, jadi bisa disimpulkan bahwa tidak terjadi gangguan heteroskedastisitas pada model regresi. Hal tersebut menandakan jika hasil estimasi regresi linier berganda layak digunakan untuk interpretasi dan analisa lebih lanjut. Hasil pengujian klasik setelah merubah model analisis menunjukkan bahwa secara eksplisit tidak terdapat, sehingga model analisis belum layak untuk dilakukan analisis regresi.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda guna menguji pengaruh PAD, DAU dan DBH terhadap pengeluaran pemerintah yang berupa belanja daerah. Hasil pengujian yang telah dilakukan nampak pada tabel sebagai berikut :

Tabel 6
Hasil Uji Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	44405,989	43778,390		1,014	,312
DAU	1,425	,053	,441	26,815	,000
DBH	,244	,061	,063	4,023	,000
PAD	1,224	,027	,713	45,654	,000

a. Dependent Variable: BD

Sumber: Data Sekunder diolah, 2018

Berdasarkan tabel 6 selanjutnya dibuat persamaan regresi sebagai berikut:

$$BD = 44.405,989 + 1,425DAU + 0,244DBH + 1,224PAD$$

Dari persamaan regresi di atas dapat diuraikan sebagai berikut: (1) Konstanta (α) dalam penelitian ini besar nilainya adalah 44.405,989. Variabel independen yang terdiri dari DAU, DBH dan PAD; (2) Koefisien Regresi DAU, nilai β_1 yang didapat adalah sebesar 1,425. Kondisi ini memperlihatkan adanya hubungan yang positif (searah) antara DAU dengan belanja daerah pemerintah kabupaten/kota Propinsi Jawa Timur. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin besar DAU akan semakin meningkatkan belanja daerah pemerintah kabupaten/kota Propinsi Jawa Timur; (3) Koefisien Regresi DBH, sebesar nilai β_1 yang didapat yaitu 0,244. Kondisi ini memperlihatkan adanya hubungan yang positif (searah) antara DBH dengan belanja daerah pemerintah kabupaten/kota Propinsi Jawa Timur. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin besar DBH akan semakin meningkatkan belanja daerah pemerintah kabupaten/kota Propinsi Jawa Timur; (4) Koefisien Regresi PAD sebesar nilai β_3 yang didapat yaitu 1,224. Kondisi ini memperlihatkan adanya hubungan yang positif (searah) antara PAD dengan belanja daerah pemerintah kabupaten/kota Propinsi Jawa Timur. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin besar PAD yang didapat akan semakin meningkatkan belanja daerah pemerintah kabupaten/kota Propinsi Jawa Timur.

Koefisien Korelasi Determinasi

Hasil pengujian tingkat koefisien korelasi dan determinasi dari DAU, DBH dan PAD secara simultan terhadap belanja daerah nampak pada tabel model *summary* sebagai berikut:

Tabel 7
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,980 ^a	,960	,959	188197,03903	2,175

a. Predictors: (Constant), PAD, DBH, DAU

b. Dependent Variable: BD

Sumber: Data Sekunder diolah, 2018

Berdasarkan tabel 7 dapat dijelaskan tingkat koefisien korelasi (R) dan determinasi (R^2) sebagai berikut :

Koefisien Korelasi (R) adalah tingkat koefisien korelasi berganda yang dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur keeratan hubungan model yang digunakan dalam penelitian yang terdiri dari DAU, DBH dan PAD terhadap belanja daerah. Nilai koefisien korelasi berganda yang didapat sebesar 0,980 atau sebesar 98,0% hasil ini memperlihatkan bahwa hubungan antara model yang digunakan dalam penelitian tersebut terhadap belanja adalah sangat erat.

Koefisien Determinasi (R^2) hasil pengujian yang telah dilakukan nilai R^2 (R^2) yang didapat sebesar 0,960. Hasil ini memperlihatkan kontribusi yang diberikan oleh semua model yang digunakan dalam penelitian terhadap belanja daerah sebesar 96,0%. Sedangkan sisanya ($100\% - 96,0\% = 4,0\%$) dikontribusi oleh faktor lainnya.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji kelayakan model yang digunakan dalam penelitian ini untuk menguji model penelitian yaitu DAU, DBH dan PAD layak atau tidak untuk dijadikan prediktor belanja daerah. Hasil pengujian yang telah dilakukan dengan menggunakan uji anova nampak pada tabel sebagai berikut :

Tabel 8
Hasil Uji Statistik F
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	158574488551545,500	3	52858162850515,164	1492,404	,000 ^b
1 Residual	6587771342671,261	186	35418125498,233		
Total	165162259894216,750	189			

a. Dependent Variable: BD

b. Predictors: (Constant), PAD, DBH, DAU

Sumber: Data Sekunder diolah, 2018

Tabel 8 menunjukkan tingkat signifikan uji $F = 0,000 < 0,05$ (*level of significant*). Hasil ini memperlihatkan model penelitian yaitu DAU, DBH dan PAD layak untuk dijadikan predictor belanja daerah. Hasil ini juga mencerminkan pengaruh variabel DAU, DBH dan PAD secara simultan terhadap belanja daerah adalah signifikan.

Uji Hipotesis (Uji t)

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji t, guna mengetahui pengaruh dari masing-masing model penelitian yang terdiri dari DAU, DBH dan PAD terhadap belanja daerah dengan kriteria uji yaitu: (1) Nilai signifikansi Uji t $> 0,05$, memperlihatkan variabel bebas tidak berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel terikat; (2) Nilai signifikansi Uji t $< 0,05$, memperlihatkan variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

Hasil uji yang telah dikerjakan akan nampak didalam tabel :

Tabel 9
Tingkat Signifikan Model Penelitian

Variabel	Koefisien regresi	Sig	Keterangan
DAU	1,425	0,000	Signifikan
DBH	0,244	0,000	Signifikan
PAD	1,224	0,000	Signifikan

Sumber: Data Sekunder diolah 2018

Berdasarkan tabel 9 bisa diterangkan pengaruh masing-masing model yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut : (1) Pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah, hasil pengujian yang telah dilakukan diperoleh tingkat signifikan variabel DAU sebesar $0,000 < \alpha = 0,050$ (*level of significant*). Hasil tersebut menunjukkan pengaruh DAU terhadap belanja daerah pemerintah kabupaten/kota propinsi Jawa Timur signifikan; (2) Pengaruh DBH terhadap Belanja Daerah, hasil pengujian yang telah dilakukan diperoleh tingkat signifikan variabel DBH sebesar $0,000 < \alpha = 0,050$ (*level of significant*). Hasil ini menunjukkan pengaruh DBH terhadap belanja daerah pemerintah kabupaten/kota propinsi Jawa Timur signifikan; (3) Pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah, hasil pengujian yang telah dilakukan diperoleh tingkat signifikan variabel PAD sebesar $0,000 < \alpha = 0,050$ (*level of significant*). Hasil ini menunjukkan pengaruh PAD terhadap belanja daerah pemerintah kabupaten/kota propinsi Jawa Timur signifikan.

Koefisien Determinasi Parsial

Koefisien determinasi parsial ini digunakan untuk mengetahui faktor mana saja yang paling berpengaruh dari model yang digunakan dalam penelitian yang terdiri atas DAU, DBH, PAD terhadap belanja daerah pemerintah kabupaten/kota propinsi Jawa Timur.

Hasil pengujian yang telah dilakukan tingkat koefisien determinasi masing-masing variabel tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 10
Koefisien Korelasi dan Determinasi Parsial

Variabel	R	R ²
DAU	0,891	0,7945
DBH	0,283	0,0801
PAD	0,958	0,9181

Sumber: Data Sekunder diolah, 2018

Berdasarkan tabel 10 dapat dijelaskan seberapa besar determinasi dari masing-masing variabel tersebut terhadap belanja daerah pemerintah kabupaten/kota propinsi Jawa Timur: (1) Koefisien determinasi parsial variabel DAU sebesar 0,7945 yang memperlihatkan besar kontribusi variabel tersebut terhadap belanja daerah pemerintah di kabupaten/kota propinsi Jawa Timur sebesar 79,45%; (2) Koefisien determinasi parsial variabel DBH sebesar 0,0801 yang memperlihatkan besar kontribusi variabel tersebut terhadap belanja daerah pemerintah kabupaten/kota propinsi Jawa Timur sebesar 8,01%; (3) Koefisien determinasi parsial variabel PAD sebesar 0,9181 yang memperlihatkan besar kontribusi variabel tersebut terhadap belanja daerah pemerintah kabupaten/kota propinsi Jawa Timur sebesar 91,81%.

Dari hasil di atas dapat kita simpulkan bahwa variabel yang mempunyai pengaruh yang lebih dominan terhadap belanja daerah pemerintah kabupaten/kota propinsi Jawa Timur adalah PAD karena mempunyai koefisien determinasi parsialnya paling besar.

Pembahasan

Pengaruh DAU Terhadap Belanja Daerah

Hasil pengujian memperlihatkan DAU berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah pemerintah kabupaten/kota propinsi Jawa Timur. Kondisi ini memperlihatkan bahwa semakin besar DAU akan semakin besar belanja daerah. Hasil ini juga mengindikasikan bahwa pemerintah daerah cenderung memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan dari pemerintah pusat dan menganggarkan peningkatan belanja yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam upaya

meningkatkan pendapatan. Pemerintah daerah lebih memilih mengusahakan penerimaan dana alokasi umum yang lebih banyak dibandingkan berupaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya sendiri yang bisa berakibat pada pengurangan dana alokasi umum. DAU adalah sumber dana yang menonjol dan bisa meningkatkan pelayanan pada khalayak sebagai tujuan desentralisasi yaitu mempercepat pembangunan di samping tetap mengoptimalkan potensi daerah untuk membiayai kebutuhan daerah.

Hasil ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Pramuka (2010), Aprilla dan Saputra (2013) serta Saputra dan Muid (2014) bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.

Pengaruh DBH Terhadap Belanja Daerah

Hasil pengujian memperlihatkan DBH berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah pemerintah kabupaten/kota propinsi Jawa Timur. Kondisi ini memperlihatkan semakin besar tingkat DBH akan semakin meningkatkan belanja daerah.

Dana bagi hasil adalah salah satu sumber dana yang berasal dari pendapatan APBN yang didistribusikan kepada daerah sesuai dengan nilai persentase tertentu yang telah ditetapkan dalam rangka mendanai kebutuhan daerah dengan tujuan pelaksanaan desentralisasi. Tingginya tingkat DBH memperlihatkan sumber dana yang diperoleh pemerintah daerah dari pendapatan APBN semakin besar. Hal ini tentu akan mendorong pemerintah daerah untuk melakukan belanja yang lebih besar guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sasana bahwa DBH berpengaruh terhadap belanja daerah.

Pengaruh PAD Terhadap Belanja Daerah

Hasil pengujian memperlihatkan PAD berpengaruh positif signifikan dan belanja daerah pemerintah kabupaten/kota propinsi Jawa Timur. Hasil ini memperlihatkan semakin tinggi Pendapatan Asli suatu daerah akan semakin meningkatkan belanja daerah. Tinggi tingkat pendapatan asli yang diperoleh akan sangat menguntungkan bagi pemerintah daerah, karena akan semakin banyak program kemakmuran masyarakat yang dapat mereka biayai sehingga belanja daerah yang lebih banyak. Semakin tinggi tingkat pendapatan asli daerah menjadikan proporsi pendapatan dan konsumsi mendekati ideal, artinya jika pendapatan meningkat maka tentunya secara proporsional konsumsipun juga akan meningkat sebaliknya jika pendapatan menurun maka konsumsi pun akan menurun pula.

Pengaruh *Flypaper Effect* pada DAU dan PAD terhadap Belanja Daerah

Hasil pengujian memperlihatkan tingkat koefisien regresi DAU sebesar 1,425 lebih besar dari tingkat koefisien regresi yang dimiliki oleh PAD sebesar 1,224. Kondisi ini memperlihatkan ditemukannya *flypaper effect*, artinya kebijakan belanja daerah lebih didominasi oleh jumlah DAU daripada PAD, atau respon belanja daerah terhadap penerimaan DAU berbeda dengan penerimaan PAD (Sasana, 2010). *Flypaper effect* dianggap sebagai anomali apabila dalam perilaku rasional transfer harus dianggap sebagai (tambahan) pendapatan masyarakat (seperti halnya pajak daerah), sehingga harus dihabiskan (dibelanjakan) dengan cara yang sama pula (Hines dan Thaler, 1995). Kondisi *flypaper effect* jelas merupakan suatu hambatan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Karena kondisi tersebut menunjukkan bahwa daerah masih bergantung terhadap pemerintah pusat. Padahal tujuan utama otonomi daerah adalah menciptakan kemandirian daerah tanpa bergantung kepada pemerintah pusat. Jika hal ini terus dibiarkan maka otonomi daerah kemungkinan akan mengalami kegagalan (Sasana, 2010).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah pemerintah kabupaten/kota propinsi Jawa Timur. Kondisi ini memperlihatkan Pemerintah daerah lebih memilih mengupayakan perolehan dana alokasi umum yang lebih besar sebagai sumber dana guna meningkatkan pelayanan pada masyarakat; (2) Dana Bagi Hasil berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah pemerintah kabupaten/kota propinsi Jawa Timur. Kondisi ini memperlihatkan tingkatnya DBH memperlihatkan sumber dana yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari pendapatan APBN semakin besar. Hal ini tentu akan mendorong pemerintah daerah untuk melakukan belanja yang lebih besar guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya; (3) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan dan belanja daerah pemerintah kabupaten/kota propinsi Jawa Timur. Hasil ini memperlihatkan semakin tinggi tingkat pendapatan asli daerah menjadikan proporsi pendapatan dan konsumsi mendekati ideal, artinya jika pendapatan meningkat maka tentunya secara proporsional konsumsipun juga akan meningkat sebaliknya jika pendapatan menurun maka konsumsi pun akan menurun pula; (4) Hasil pengujian memperlihatkan tingkat koefisien regresi DAU lebih besar dari tingkat koefisien regresi yang dimiliki oleh PAD. Kondisi ini memperlihatkan ditemukannya *flypaper effect*, artinya kebijakan belanja daerah lebih didominasi oleh jumlah DAU daripada PAD.

Saran

Berdasarkan hasil analisis serta simpulan yang telah dilakukan maka saran yang diberikan adalah sebagai berikut : (1) Pemerintah Daerah sebaiknya meningkatkan sumber penerimaan dari pajak dan retribusi yang cukup potensial. Selain itu juga menggali potensi daerah untuk meningkatkan sumber pendapatan dari kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan sumber penerimaan dari daerahnya sendiri yakni PAD sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada transfer Pemerintah Pusat; (2) Diharapkan penelitian selanjutnya dapat menjelaskan variabel internal penyebab terjadi *flypaper effect*, seperti melakukan wawancara langsung pada pihak yang terlibat dalam penyusunan APBD.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah dan Halim. 2003. Pengaruh Pajak Daerah dan PAD terhadap Belanja Daerah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan* 7(1).
- Adi, P. H. dan P. D. Ekaristi. 2009. Fenomena Ilusi Fiskal dalam Kinerja Anggaran Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 6(1).
- Adiputra, I. M. P. 2014. Flypaper effect pada DAU dan PAD terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Karangasem. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika (JINAH)*.
- Amelia, R. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi kasus pada Kab/Kota di Jawa Tengah 2012-2014). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.
- Anthony, R. N. dan V. Govindarajan. 2010. *Management Control System*. Buku 2. Salemba Empat. Jakarta.
- Aprilla, N. dan A. S. Saputra. 2013. Pengaruh Flypaper Effect, Dana Alokasi Umum, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Akuntansi* 3(2): 107-131.
- Bastian, I. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Edisi Pertama. Cetakan Kedua. Erlangga. Jakarta.

- Darwanto dan Y. Yustikasari. 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Jurnal. Simposium Nasional Akuntansi X Makassar*.
- Ferdinand, M. 2006. *Metode Penelitian Manajemen*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Ghozali, I. 2007. *Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Cetakan Empat. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- _____. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hagen, V. 2005. Political Economy of Fiscal Institutions. *Discussion Paper 149, Governance and Efficiency Of Economic System*. GESY.
- Halim, A. 2008. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. Cetakan Ketiga. Salemba Empat. Jakarta.
- Hines, J. R. dan R. H. Thaler. 1995. Anomalies The Flypaper Effect. *Journal Of Economic Perspectives* 9(4): 217-226.
- Iskandar, I. 2012. Flypaper Effect pada Uncontional Grants. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Padjajaran Bandung* 13(1).
- Kurnia, E. D. 2013. Analisis Flypaper Effect berdasarkan Pemetaan Indeks Kemampuan Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah: Universitas Brawijaya*.
- Kusumadewi, D. A. dan A. Rahman. 2007. Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia* 11(1).
- Legrenzi, G. dan C. Milas. 2001. Non Linear And Asymmetric Adjustment The Local Revenue-Expenditure Models: Some Evidence From The Italian Municipalities. *Working paper*. University of Milan.
- Maimunah, M. 2006. Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera. *Jurnal. Simposium Nasional Akuntansi IX Padang*. 23-26 Agustus: 1-27.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik. Edisi Pertama*. Andi. Yogyakarta.
- Nabilah, A. N. 2016. Analisis Flypaper Effect PAD dan DAU terhadap Belanja Daerah di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2010-2014. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 14(2).
- Oktavia, D. 2014. Flypaper Effect: Fenomena Serial Waktu dan Lintas Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2003-2013. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember* 12(2).
- Pramuka, B. A. 2010. Flypaper Effect pada Pengeluaran Pemerintah Daerah di Jawa. *Artikel Universitas Muhammadiyah Surakarta* 11(1).
- Purnamawati, D. 2006. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Pelayanan Publik (Studi pada Kabupaten Boyolali, Sukoharjo dan Klaten). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Jendral Soedirman. Purwokerto.
- Purwanti, E. S. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Dian Nuswantoro. Semarang.
- Rahmawati, L. R. 2015. Flypaper Effect Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah. *Jurnal Ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya* 4(9).
- Saputri, M. A. dan D. Muid. 2014. Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2011-2012. *Thesis*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Diponegoro. Semarang.

- Sasana, H. 2010. Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Provinsi di Indonesia. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang* 5(2).
- Sidik, M. 2012. Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiscal (Antara Teori dan Aplikasinya di Indonesia). *Seminar Sepuluh Tahun Implemetasi Kebijakan Otonomi Daerah di Indonesia*. Yogyakarta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang *Pemerintahan Daerah*. 7 Mei 1999. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. 15 September 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. Jakarta.
- Yuswanto. 2010. *Pengertian Hubungan Pusat Keuangan. Bahan Ajar Mata Kuliah Analisis Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*. PPs MIP FISIP UNILA. Bandar Lampung.
- Zampelli, E. M. 1986. Resource Fungibility, The Flypaper Effect, And Expenditure Impact Of Grants-In-Aid. *The Review Of Economics And Statistic* 67: 33-40.